

**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,
KOMITMEN MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai)**

**Oleh :
Ratih Anggraini
Pembimbing : Zulbahridar dan Al Azhar L**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : ratihanggraini95@gmail.com*

*The effect of external pressure, environmental uncertainty, management
commitment and the government's internal control system to
transparency of financial reporting
(Empirical Study at Dumai City Regional Devices Organization)*

ABSTRACT

This study examines the effects of external pressures, environmental uncertainty, management commitments and the government internal control systems on the transparency of financial reporting. The population in this research is the organization of Dumai city area of 34 opd. Of the existing population then obtained samples in this study as many as 102 respondents. Sampling technique using purposive sampling method, while the data processing method used by SPSS version 20.0 as software to process data. The results of the research indicate that external pressure has significant effect on the transparency of financial reporting. Environmental uncertainty has a significant effect on the transparency of financial reporting. Management commitment has a significant effect on the transparency of financial reporting. And the government's internal control system have a significant effect on the transparency of financial reporting.

Keywords : External Pressure, Environmental Uncertainty, Management Commitment, the government's internal control system and transparency of financial reporting.

PENDAHULUAN

Pada masa otonomi daerah sekarang ini, pengelolaan keuangan Negara merupakan hal yang sangat wajib di transparansikan. Otonomi daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan

rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007).

Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggung jawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja (Silvia, 2009).

Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah,

tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Menurut Hastuti (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah adalah (1) penyajian laporan keuangan; (2) aksesibilitas laporan keuangan; (3) pengendalian internal; (4) tekanan eksternal; (5) ketidakpastian lingkungan; (6) komitmen manajemen; dan (7) pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Tekanan eksternal yang berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit untuk di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada OPD sebagai level pelaksana.

Ketidakpastian Lingkungan adalah kondisi dimana OPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak *match*-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya.

Menurut Robbins dan Judge (2007) komitmen merupakan sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan organisasinya. Dapat diartikan bahwa komitmen manajemen akan mengandung unsur loyalitas terhadap organisasi keterlibatan dalam kinerja

untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik.

Menurut PP No.60 tahun 2008 tersebut, SPIP didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP tersebut memiliki beberapa unsur yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai? (2) Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai? (3) Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai? (4) Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. (2) Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. (3) Pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. (4)

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai.

TELAAH PUSTAKA

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Ridha (2012) transparansi merupakan kemudahan untuk publik dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan tergantung pada akses publik terhadap pelaporan keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat mempunyai hak untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan dilakukan.

Silvia (2009) penerapan transparansi adalah cara mendapatkan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja.

Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah sistem dalam menciptakan hasil laporan keuangan yang transparan yang merupakan tuntutan

dari semua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal dan pihak eksternal. Silver (2005) menyatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi kepada publik. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik melalui pelaporan keuangan yang terbuka akan menciptakan transparansi. Semakin baik penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Tekanan Eksternal

Menurut Ridha (2012), tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan ini berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan

tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.

Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit untuk diterapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Hubungan antara tekanan eksternal dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan jika ditinjau dari teori institusional disebabkan oleh adanya isomorfisme koersif. Dimana isomorfisme koersif selalu terkait dengan segala hal yang terhubung dengan lingkungan di sekitar organisasi. DiMaggio dan Powell (1983), menyatakan bahwa: Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya. DiMaggio dan Powell juga menyatakan bahwa isomorfisme koersif berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi. Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem. Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. Dalam teori institusional, organisasi ditekan

menjadi semakin sama, kadang-kadang karena kendala lingkungan (DiMaggio dan Powell 1983 dalam Ridha, 2012).

Deddi (2013) Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak *match*-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Faktor yang paling mendasar terjadi ketika terjadi perubahan struktur pemerintahan dari rezim orde baru kemasa reformasi. Keterbukaan didalam berdemokrasi hingga aspek yang lain dilakukan secara gambling, akan tetapi tidak dilakukan secara dewasa. Perubahan lingkungan tentu dapat menciptakan dua kemungkinan, pertama mendorong terjadinya percepatan proses transparansi, atau pun perubahan yang bersifat mendorong melambatnya proses transparansi.

Komitmen Manajemen

Norman mempersepsikan komitmen manajemen sama dengan komitmen organisasi. Komiten organisasi sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi bagian dari organisasi.

Sedangkan manajemen menurut Mukjizat dalam silvia (2013) merupakan pejabat pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya organisasi sehingga orang bekerja sama dengan efektif untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen harus mencapai tujuan dengan bekerja melalui orang lain, karena pimpinan tidak akan dapat melaksanakan seluruh strategi organisasi dengan bekerja sendiri.

Transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif pada organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Kebanyakan perda transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakkannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefenisikan Sistem Pengendalian Intern adalah: sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu sebelum auditor melakukan audit secara mendalam atas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memahami terlebih dahulu pengendalian intern. Pengendalian intern (*internal control*) sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan untuk kepentingan organisasi.

Seperti yang kita ketahui, jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik Negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Tekanan eksternal merupakan suatu dorongan atau penolakan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakan yang berasal dari luar organisasi yaitu seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya peraturan tersebut ditunjukkan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik (Ridha, 2012). Akan tetapi, dalam praktiknya peraturan-peraturan daerah tersebut masih sulit untuk di terapkan oleh pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asmidawati (2013) menunjukkan bahwa tekanan eksternal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian solin (2013) yang membuktikan bahwa tekanan eksternal memberikan pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan

Tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya peraturan pemerintah, tekanan masyarakat ataupun dorongan dari pihak tertentu memperlancar proses transparansi untuk dilakukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Dari uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₁: Terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Sudybio (2010) permasalahan umum didalam proses transparansi dilingkungan pemerintah pusat di Indonesia berkaitan dengan sering terjadinya perubahan kultur politik dan pemerintahan. Segala prosedur yang telah disiapkan rezim terdahulu untuk menciptakan transparansi sering kali tidak berdaya dalam menghadapi berbagai perubahan didalam struktur politik dan pemerintahan.

Faktor yang paling mendasar terjadi ketika terjadi perubahan struktur pemerintahan dari rezim

orde baru kemasa reformasi. Keterbukaan didalam berdemokrasi hingga aspek yang lain dilakukan secara gambling, akan tetapi tidak dilakukan secara dewasa. Hal tersebut terlihat dari berbagai demo yang anarkis dan berbagai tindakan kekerasan di sejumlah daerah untuk menuntut keadilan dalam berbagai bidang. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis berikut:

H₂: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Dalam penelitian Ridha dan Basuki (2012), berdasarkan analisis konten dan wawancara terhadap responden terpilih, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di SKPD yang berada pada wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan SKPD tidak hanya mendapatkan informasi yang bersifat positif saja tetapi juga informasi berupa ketidakpastian.

Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Sistem manajemen yang baik, yaitu apabila SKPD memiliki staf yang handal dan kompeten dibidangnya akan berdampak pada tercapainya transparansi pelaporan keuangan sehingga standar profesionalisme pada SKPD dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis berikut :

H₃: Terdapat pengaruh komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Diana Sari (2012) menemukan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan secara umum termasuk kedalam kategori baik pada pemerintah kota Cimahi.

Seperti yang kita ketahui, jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, asset milik Negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian diatas dapat diajukan hipotesis berikut :

H₄: Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Penerapan transparansi pelaporan keuangan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah di kota Dumai. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah kepala bagian keuangan, bendahara keuangan, dan staf keuangan di setiap OPD di Kota Dumai..

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian dilakukan dengan cara mengirim kuesioner.

Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Penerapan transparansi pelaporan keuangan didefinisikan sebuah proses yang dilakukan untuk melaksanakan keterbukaan di dalam penyajian pelaporan keuangan. Untuk mengukur penerapan transparansi laporan keuangan dapat diadopsi indicator dari Ridha dan Basuki (2012) yaitu ada 5 indikator.

Variable Independen

1. Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal sebagai desakan yang bersumber dari luar organisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk mengukur tekanan eksternal dapat digunakan indikator yang di adopsi dari Ridha dan Basuki (2012) yaitu ada 6 indikator.

2. Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian Lingkungan dalam hal ini adalah Kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak *match-nya* antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan

diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Untuk mengukur ketidakpastian lingkungan dapat digunakan indikator yang diadopsi dari Ridha dan Basuki (2012) yaitu ada 4 indikator.

3. Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen merupakan kecenderungan seseorang dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya organisasi sehingga orang bekerja sama dengan efektif untuk mencapai sasaran organisasi (Silvia, 2009). Untuk mengukur komitmen manajemen maka digunakan indikator yang di adopsi dari Ridha dan Basuki (2012) yaitu ada 6 indikator.

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur SPIP dapat digunakan indicator yang di adopsi dari Diana Sari (2012) yaitu ada 16 indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebarikan pada 34 Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Kota Dumai secara langsung. Dari 102 kuesioner yang disebarkan, kuesioner yang kembali sebanyak 87 kuesioner (85,29 %). Kuesioner yang tidak mendapatkan respon sebanyak 15 kuesioner (14,71 %). Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 87 kuesioner (85,29 %). Berikut ini Tabel 1 rincian pengembalian kuesioner oleh para responden.

Tabel 1

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang dikirim	102	100 %
Kuesioner yang tidak mendapatkan respon	15	14,71 %
Kuesioner yang kembali	87	85,29 %
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0 %
Kuesioner yang dapat diolah	87	85,29 %

Sumber : Data Olahan (2017)

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai r hitung > r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, system pengendalian internal pemerintah dan penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah valid.

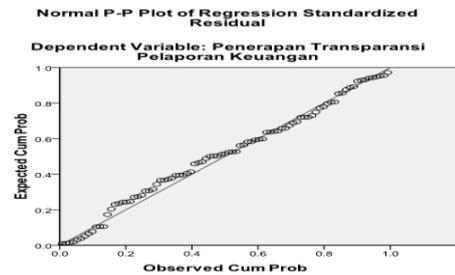
2. Hasil Uji Realibilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien *Cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu

pengukur dapat dikatakan dapat diandalkan apabila memiliki koefisien *Cronbach alpha* lebih dari 0,7.

Hasil Uji Normalitas

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan (2017)

Pada gambar 1 normal probability plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 2

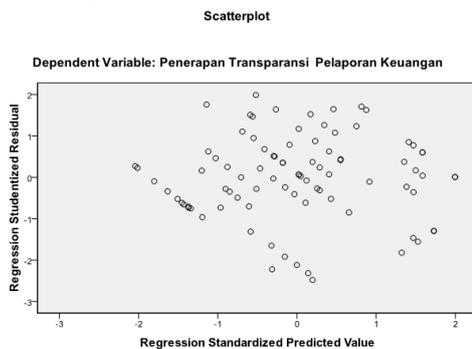
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tekanan Eksternal (X ₁)	0.304	3.286
Ketidakpastian Lingkungan (X ₂)	0.402	2.488
Komitmen Manajemen (X ₃)	0.402	2.490
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	0.394	2.536

Sumber : Data Olahan (2017)

Dari hasil perhitungan analisis diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai $VIF < 10$ maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya (Ghozali, 2011). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat pada table 2.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar : 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : *Data Olahan (2017)*

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser Test*. Dari hasil perhitungan, menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter penduga. Bisa dilihat dari gambar 2.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Tekanan Eksternal dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu yaitu $2.162 > 1,988$ dan $sig.t (0.033) < 0,05$ dengan demikian H_{01} ditolak dan **Ha₁**

diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tekanan Eksternal Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya peraturan pemerintah, tekanan masyarakat ataupun dorongan dari pihak tertentu memperlancar proses transparansi untuk dilakukan dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi dan tegas peraturan pemerintah yang mengatur transparansi pelaporan keuangan maka penerapan transparansi akan menjadi lebih baik lagi.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai variabel ketidakpastian lingkungan dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.291 > 1,988$ dan $sig.t (0,001) < 0,05$ dengan demikian H_{02} ditolak dan **Ha₂ diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ketidakpastian Lingkungan Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya. Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan

memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai variabel komitmen manajemen dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.056 > 1.988$ dan $sig.t (0.043) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Komitmen Manajemen Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Semakin tinggi komitmen manajemen aparat pemerintah daerah maka akan semakin tinggi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tingginya komitmen manajemen dalam melaksanakan aturan dan prosedur organisasi tentu akan mendorong meningkatnya transparansi pelaporan keuangan.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa nilai variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.021 > 1,988$ dan $sig.t (0,047) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Berpengaruh Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata

kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan Negara. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah maka akan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hazar (2014). Yang menemukan hasil bahwa Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Septiani Dewi, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati (2015). yang menyatakan bahwa Tekanan Eksternal tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddi (2014) dan Nela Solin (2013) Yang

- menemukan hasil bahwa Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hazar (2014) yang menyatakan bahwa Ketidakpastian Lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johannes (2013). Yang menemukan hasil bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) Yang menyatakan bahwa Komitmen Manajemen tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
 4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012). Yang menemukan hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Namun tidak sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armando (2013) Yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

Keterbatasan

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing Responden.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Saran

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup sampel diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel lain untuk melihat pengaruhnya terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Armando, Gerry, 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*

- Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bukittinggi).* Jurnal. Universitas Negeri Padang
- Asmidawati. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.* Jurnal Universitas Riau
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar.* Erlangga, Jakarta
- Dacin, M. T., J. Goodstein., dan W. R. Scott. 2002. Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *The Academy of Management Journal*
- DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields. *American Sociological Review.*
- Fauzi, Eko, 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Internal terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal. Universitas Riau.
- Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory.*
- Hazar, Muhammad, 2014. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan di Kabupaten Muna.* Jurnal. Universitas Hasanuddin
- Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly.*
- Indriantoro, Nur dan Bambang supono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen (Ed. 1)* BPFE. Yogyakarta.
- Johannes, Sihaloho. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.* Jurnal Universitas Riau
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah.* Jurnal Ekonomi Rakyat. Tersedia di [Http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm)
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Andi, Yogyakarta

- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2 No. 1
- Nela, Dwi Dan Etika. 2013. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah*. Jurnal Penelitian Terdahulu Universitas Bung Hatta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Ridha, M. Arsyandi dan Hardi Basuki, 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012.
- Revrisond Baswir, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Ridwan, 2007, *Pengaruh Peran Aparatur Dalam Perencanaan dan Pengendalian APBD, Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemda*, Disertasi, Unpad Bandung
- Rosjidi, 2001, *Akuntansi Sektor Puhlik Pemerintah*, Surabaya, Aksara satu.
- Robbinns Stevan dan Timothy. 2008. *Organizational Behavior*. McGrawhill, Irwin.
- Suwardjono.2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yokyakarta.
- Sari, Diana. 2010. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Penelitian Terdahulu Universitas Padjajaran, Bandung (Studi Empiris Pada SKPD Kota Cimahi)
- Silvia 2013 *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Mabajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh). Skrpsi
- Sedamaryanti. 2007. *Good Governance dan Good Coorporate Governance*, Mandar Maju, Bandung
- Scott, W.R.1987. *The Adolscence of Institutional Theory. Administrative Science Quarterly*

- Silver, D. 2005. Creating Transparency for Public Companies The Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist*.
- Stiglitz, J.E.1999. On Liberty, the right to know, and public Discourse: the role of transparency in public life. Oxford Amnesty Lecture, Oxford, U.K.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Otonomi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008*
- Wayan, Ni Septiani Dewi, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati, 2015. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha